

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 179 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN  
2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/D/I merupakan prasyarat untuk mempercepat reformasi di bidang pengadaan barang/jasa agar lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

b. bahwa dalam rangka memberi penghargaan sebagai bentuk apresiasi untuk meningkatkan kualitas LPSE dan implementasi pengadaan secara elektronik dapat terlaksana dengan lebih cepat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penghargaan Kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2016;

Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGHARGAAN KEPADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2016.
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada LPSE yang berprestasi dalam implementasi pengadaan secara elektronik pada tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENGHARGAAN KEPADA  
LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK TAHUN 2016

NOMOR : 179 TAHUN 2016

TANGGAL : 27 Oktober 2016

DAFTAR NAMA LPSE BERPRESTASI YANG MENDAPAT PENGHARGAAN DALAM  
IMPLEMENTASI PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2016

No.	Nama LPSE	Kategori Penghargaan
1.	1. LPSE Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. LPSE Provinsi Bangka Belitung 3. LPSE Provinsi Riau 4. LPSE Provinsi Bengkulu 5. LPSE Kota Bogor 6. LPSE Kota Padang Panjang 7. LPSE Kota Sawahlunto 8. LPSE Kota Solok 9. LPSE Kota Tangerang 10. LPSE Kota Padang 11. LPSE Kota Lubuklinggau 12. LPSE Kota Payakumbuh 13. LPSE Kabupaten Tanah Datar 14. LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai 15. LPSE Kabupaten Lombok Tengah 16. LPSE Kabupaten Bengkulu Tengah 17. LPSE Kabupaten Berau 18. LPSE Kabupaten Sanggau 19. LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara 20. LPSE Kabupaten Kotabaru 21. LPSE Kabupaten Limapuluh Kota 22. LPSE Kabupaten Padang Pariaman 23. LPSE Kabupaten Bogor	Komitmen Penerapan Standar LPSE : 2014
2.	1. LPSE Provinsi Jawa Barat 2. LPSE Provinsi Riau 3. LPSE Kabupaten Lombok Tengah 4. LPSE Kabupaten Banyuasin	Inovasi LPSE

3.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPSE Provinsi Sumatera Barat</li> <li>2. LPSE Provinsi Bangka Belitung</li> <li>3. LPSE Provinsi Jawa Barat</li> <li>4. LPSE Provinsi Kalimantan Selatan</li> <li>5. LPSE Provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>6. LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat</li> <li>7. LPSE Provinsi Papua</li> </ol>	Peran LPSE Provinsi
4.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPSE Kabupaten Kepulauan Mentawai</li> <li>2. LPSE Kabupaten Natuna</li> <li>3. LPSE Kabupaten Talaud</li> <li>4. LPSE Kabupaten Anambas</li> </ol>	LPSE " <i>Fighting Spirit</i> " (LPSE yang berjuang dalam keterbatasan berdasar <i>availability &amp; failure detected</i> serta daerah <i>remote</i> )
5.	LPSE Provinsi Kalimantan Utara	<i>The Rookie</i> (LPSE Pendatang Baru yang memiliki progress yang baik dalam 2 tahun terakhir)
6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Ika Mardiah, M.Si (LPSE Provinsi Jawa Barat)</li> <li>2. Alm. Ir. Herson, Dipl. Is., M.Sc (LPSE Provinsi Kalimantan Tengah)</li> <li>3. Norwanti, ST, M.Kp (LPSE Provinsi Papua)</li> </ol>	Pejuang LPSE (Personil LPSE yang konsisten sejak awal LPSE terbentuk)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO